

Abstrak

Studi yang dilakukan berupa tinjauan atas pelaksanaan relaksasi pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan di masa pandemi COVID-19 pada KPKNL Surakarta. Tujuan dari tinjauan adalah untuk mengetahui tujuan dari pelaksanaan relaksasi pembayaran sewa, pengaruh pelaksanaan terhadap optimalisasi PNBP, dan permasalahan yang menghambat. Metode yang digunakan dalam tinjauan adalah metode studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil tinjauan diperoleh jawaban bahwa tujuan pelaksanaan relaksasi pembayaran sewa adalah dukungan DJKN Kementerian Keuangan dalam program PEN. Dalam pelaksanaannya relaksasi yang diberikan telah meningkatkan jumlah persetujuan sewa yang diterbitkan dan PNBP yang diterima KPKNL Surakarta. Di tahun 2020 PNBP yang diterima meningkat 87,47% dibandingkan tahun 2019, dan di tahun 2021 PNBP mengalami peningkatan 1,26%. Permasalahan yang dihadapi KPKNL Surakarta adalah tingginya nilai usulan permohonan sewa yang diajukan satuan kerja, tidak adanya sosialisasi pelaksanaan relaksasi, ketidaklengkapan dokumen permohonan sewa yang diajukan dan tingginya tarif penyesuaian untuk jenis usaha pendidikan.

Kata Kunci: Barang Milik Negara, Pemanfaatan Sewa, KPKNL Surakarta

Abstract

The study was conducted in the form of a review of the implementation of the relaxation of land and/or building rental payments during the COVID-19 pandemic at the Surakarta KPKNL. The purpose of the evaluation is to determine the purpose of the relaxation of rental payments, the effect of implementation on the optimization of PNBP, and the problems that hinder it. The method used in the review is the literature study and field studies conducted by observation and interviews. The results of the review answered that the purpose of implementing the relaxation of rent payments is the support of the Ministry of Finance's DJKN in the PEN program. In practice, the relaxation provided has increased the number of lease approvals issued and the PNBP received by the Surakarta KPKNL. In 2020 PNBP received increased by 87.47% compared to 2019, and in 2021 PNBP increased by 1.26%. The problems faced by the Surakarta KPKNL are the high value of the proposed rental application submitted by the work unit, the absence of socialization of the relaxation implementation, the incompleteness of the submitted rental application documents, and the high adjustment rate for this type of education business.

Keywords: State Property, Rental Utilization, KPKNL Surakarta